**ABSTRAK**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang adalah unsur perencanaan dari penyelenggaraan pemerintah daerah yang secara garis besar melaksanakan kewenanagan otonomi daerah dalam bidang urusan kependudukan dalam rangka pelaksanaan tugas sesentralisasi. Laporan akhir ini berjudul “**PELAKSANAAN PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT.** Di latarbelakangi oleh semakin banyaknya penduduk pendatang yang tinggal di Kabupaten Sumedang menyebabkan perlunya Dinas Kependudukan dan Pemcatatan Sipil melakukan perhatian khusus terkait hal tersebut yaitu melakukan pendataan penduduk pendatang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pendataan penduduk non permanen di kabupaten sumedang, faktor-faktor apakah yang dapat memperngatuhi dalam pelaksanaan oendataan penduduk non permanen, serta upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi hal tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan 3 cara yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang dilaksanakan menunjukkan bahwa pelaksanaan pendataan penduduk non permanen di Dinas KEpendudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sumedang belum berjalan dengan maksimal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu kurangnya perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan pendataan penduduk non permanen, rendahnya kepedulian masyarakat akan pentingnya pendaftaran penduduk khususnya pendataan penduduk non permanen dan kurangnya koordinasi antara dinas dengan camat maupun lurah terkait pelaporan data penduduk pendatang.

Selanjutnya penulis menyarankan agar Pemerintah Daerah meningkatkan kepedulian dan perhatian lebih dalam pelaksanaan pendataan penduduk non permanen, melaksanakan sosialisasi tentang pendataan penduduk non permanen, melakasanakan pelatihan baik melalui diklat pimpinan atau rapat koordinasi agar terciptanya kerjasama antar dinas dengan kecamatan dan kelurahan dalam melakkan pendataan penduduk non permaenen serta pemeliharaan sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan sehingga masyarakat paham tentang pentingnya tertib administrasi kependudukan.